

TESIS

**PERANAN PROGRAM REHABILITASI GERNASKAKAO
DALAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI
DIKECAMATANSABBANGKABUPATEN LUWU UTARA**



OLEH

JONI SIAGIAN

NIM P0108211518

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI SISTEM – SISTEM PERTANIAN (SSP)

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

TESIS**PERANAN PROGRAM REHABILITASI GERNAS KAKAO DALAM
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PENDAPATAN PETANI
DI KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

Diusulkan dan diajukan oleh :

JONI SIAGIAN
No. Pokok : P0108211518

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 19 Agustus 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat ,

Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, MS
Ketua

Ketua Program Studi
Sistem-Sistem Pertanian

Dr. Muhammad Arsyad, SP, M.Si
Anggota

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena dengan rahmatNya sehingga laporan hasil penelitian dapat diselesaikan dan disusun. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan yang berharga bagi penulis untuk mengikuti studi lanjutan pada Program Magister.
2. Prof.Dr.Ir. Mursalim, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa untuk menimba ilmu dan menambah pengalaman akademik.
3. Prof.Dr.Ir. Kaimuddin, MS selaku Ketua Program Studi Sistem-Sistem Pertanian Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Prof.Dr.Ir. Sitti Bulkis, MS. dan Dr. Muhammad Arsyad,S.P,M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof.Dr.Ir. A. Rahman Mappangaja,MS, Prof.Dr.Ir. Elkawakib Sjam'un, MS. dan Prof.Dr.Ir.Didi Rukmana, MS selaku dosen penguji yang banyak memberikan kontribusi berupa kritik dan saran yang sangat bermanfaat.
6. Ir. H. Abd. Mahfud, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara yang berkenaan memberikan izin penelitian, Ir.Imran selaku Kabid Perkebunan, Ir.Nursiati selaku Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi dan seluruh staf atas dukungan dan bantuannya.
7. Ir. Syafi'i, M.Si selaku Kepala SMK Negeri 1 Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yang berkenaan memberikan izin belajar dan memberi dukungan serta motivasi dalam menyusun karya ilmiah ini.

8. Kedua orang tua tercinta Yoseph Uttu Siagian dan Theresia SS atas dukungan, perhatian dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Istri tercinta Desi Patongloan, AMd.Kep dan anak Gregorius Deon Siagian yang selalu memotivasi, mendoakan dan membiayai penulis dalam penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
10. Kakak Paulina Reny, S.Pd, Antonius Sandarupa, Mery Theresia, A.Md dan adik Theodorus Siagian, Adolfina Suri Suri Siagian, Alberthin Bukka, SKM yang memberi dukungan dan semangat serta doa demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Sistem-Sistem Pertanian Konsentrasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pertanian khususnya angkatan 2011/2012 atas segala suka dan duka serta kebersamaan yang indah dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
12. Pendamping Gernas Kakao Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Anton Abidin) yang telah banyak memberikan informasi dalam pelaksanaan penelitian.
13. Para pengurus dan anggota kelompok tani kakao program rehabilitasi Gernas Kakao Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sebagai responden dalam pengambilan data dilapangan.

Penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima sumbangan pemikiran berupa kritikan, inovasi dan saran yang konstruktif guna pengembangan keilmuan, masyarakat luas serta pihak pemerintah dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Makassar, 19 Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

JONI SIAGIAN. *Peranan Program Rehabilitasi Gernas Kakao Dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara* (dibimbing oleh Sitti Bulkis dan Muhammad Arsyad).

Penelitian bertujuan, (1) untuk mendiskripsikan kondisi pelaksanaan rehabilitasi Gernas Kakao (2) untuk menganalisis peningkatan produksi dan pendapatan petani sebelum dan setelah adanya program rehabilitasi Gernas Kakao di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilakukan dengan Metode Simple Random Sampling pada 10 Desa di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan kusioner pada petani responden dengan jumlah sampel 38 orang petani kakao yang masuk dalam kelompok tani sasaran program rehabilitasi Gernas Kakao Tahun 2009. Data produksi dan pendapatan sebelum program rehabilitasi tahun 2008-2010 dan setelah program rehabilitasi Gernas Kakao tahun 2011-2012 dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif dan analisis uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kondisi pelaksanaan kebijakan rehabilitasi yang tidak sesuai dengan Panduan Teknis Budidaya Tanaman Kakao Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2009 yaitu pemotongan batang pohon utama 50 cm diatas sambungan setelah berumur 6 bulan (0%) dan biji tidak difermentasi. Kegiatan yang sesuai yaitu bahan tanaman (entres) (100%), sarana produksi (100%), rata-rata jumlah tegakan/populasi tanaman 1100-1500 pohon (79%), rata-rata produktivitas tanaman 500-1000 kg/ha/tahun (67%), rata-rata umur tanaman 16 tahun (53%), rata-rata luas lahan 1-1,5 ha (42%) dan rata-rata pohon pelindung 31-60 pohon/ha (42%). (2) Produksi rata-rata kakao sebelum program rehabilitasi Gernas Kakao yaitu 700kg/ha/tahun, dan meningkat setelah program rehabilitasi yaitu 1595kg/ha/tahun (127,9%). Pendapatan rata-rata sebelum Rp.13.996.421/ha/tahun meningkat setelah program rehabilitasi yaitu Rp.29.538.438 /ha/tahun (111,0%).

Kata Kunci : Rehabilitasi,Produksi ,Pendapatan

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	13
C. TujuanPenelitian	13
D. KegunaanPenelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. FalsafahKebijakan	15
1. PengertianKebijakan.....	15
2. Agenda Kebijakan.....	16
3. FormulasiKebijakan	18
4. AnalisisKebijakan.....	19
5. EvaluasiKebijakan.....	20
B. GerakanNasionalPeningkatanProduksi Dan MutuKakao Tahun 2009.....	24
1. LatarBelakangKelahiranGernaskakaoTahun 2009	24
2. PendekatandanPolaGerakan.....	27
C. Rehabilitasi	31
D. Petani.....	46
E. Produksi.....	48
1. Komponen Produksi Tanaman Kakao	51
2. Sistim Budidaya Kakao.....	53
3. KeberlanjutanSistimBudidayaKakao.....	56
F. Harga	57
G. Pendapatan	59
1. PengertianPendapatan	59
2. KonsepPendapatan	60
3. AnalisisPendapatan	64
D. KerangkaPikirPenelitian.....	68

BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Tempat dan Waktu Penelitian	69
B. Penentuan Populasi dan Sampel	69
C. Jenis dan Sumber Data	70
D. Teknik Analisis Data	71
E. Definisi Operasional Variabel	72
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 75
A. Profil Petani	75
1. Umur Petani	75
2. Tingkat Pendidikan	76
3. Pengalaman Berusaha Tani Kakao	78
4. Keaktifan Dalam Kelompok Tani	79
B. Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi Gernas Kakao	81
1. Luas Lahan	81
2. Persyaratan Kebun	82
a. Umur Tanaman	83
b. Jumlah Tegakan/Populasi Tanaman	84
c. Produktivitas Tanaman	86
d. Pohon Pelindung	87
e. Terserang OPT	88
f. Kesesuaian Curah Hujan	89
3. Entres	89
4. Pemeliharaan	91
a. Pemotongan Batang Utama	91
b. Pemangkasan Tunas Air	92
c. Pemupukan	92
d. Sanitasi	93
5. Sarana Produksi	94
6. Pemberdayaan Petani	95
7. Pemasaran	97
8. Kelembagaan	98
C. Analisis Produksi dan Pendapatan Petani	99
1. Produksi	100
2. Pendapatan	108
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

No	Teks Halaman	
1.1	ProduksiKakaoMenurutProvinsi di Seluruh Indonesia SebelumdanSesudahGernasKakaoTahun 2009 (ton)	6
1.2	Target danRealisasiPelaksanaanGernasKakao di Indonesia Selama 2 Tahun Pertama (2009-2010) Dan Rencana Tahun 2011 (ha)	8
1.3.	Produksi Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara SebelumdanSetelahGernasKakaoTahun 2009 (ha)	11
1.4.	Target danRealisasiLuas Areal KegiatanRehabilitasi GernasKakaoKabupatenLuwu Utara Tahun 2009-2012 (ha)	12
3.1	VariabeldanIndikatorPengukuran	71
4.1	DistribusiFrekuensiUmurPetani (tahun)	76
4.2	DistribusiFrekuensi Tingkat PendidikanPetani	77
4.3	DistribusiPengalamanBerusahatani (tahun)	79
4.4	DistribusiKeaktifanPetani	80
4.5	DistribusiKepemilikanLahanPetani (ha)	81
4.6	DistribusiUmurTanamanPetani (tahun)	84
4.7	DistribusiJumlahTegakan/PopulasiTanaman (pohon/ha)	85
4.8	DistribusiProduktivitasTanaman (kg/ha/tahun)	86
4.9	DistribusiPohonPelindung (pohon/ha)	88
4.10	DistribusiPemotonganBatangUtama	91
4.11	DistribusiSanitasiKebun	94
4.12	DistribusiFrekuensiPelatihanPetani	96
4.13	KomponenProduksiKlonKakaoSebelumdanSetelah RehabilitasiGernasKakao	101
4.14.	Produksi Rata-Rata BijiKeringSebelumdanSetelah RehabilitasiGernasKakao (kg/ha/tahun)	102

4.15 Interval Kategori Tingkat Produktivitas Biji Kering Kakao (kg/ha/Tahun)	105
4.16 Distribusi Produksi Rata-Rata Kakao Petani Sebelum dan Setelah Gernas Kakao (kg/ha/tahun)	105
4.17 Pendapatan Rata-Rata dan Peningkatan Pendapatan Rata-Rata Sebelum dan Setelah Gernas Kakao (Rp)	110

FTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
2.1.	Kerangka Pikir Penelitian	68
2.2.	Produksi Rata-Rata Biji Kering Kakao (Kg) Tahun 2008 – 2012	107
2.3.	Pendapatan Rata-Rata (Rp) Tahun 2008 – 2012	112

DAFTAR LAMPIRAN

No	TeksHalaman	
1	ProduksiKakao(BijiKering) danPeningkatanProduksiKakao PetaniSebelumdanSetelahGernasKakao	119
2	Pendapatan(Rp) danPeningkatanPendapatanKakaoPetani SebelumdanSetelahGernasKakao	120
3	DaftarHargaPasarKomoditi Perkebunan Sentra HasilOlahan	121
4	IdentitasPetani	122
5	Uji Beda Produksi Rata-Rata KakaoPetaniSebelum danSetelahRehabilitasiGernasKakao	124
6	Uji Beda Pendapatan Rata-Rata PetaniKakao SebelumdanSetelahrehabilitasiGernasKakao	125
7	PetaHampanTanamanKakaoKecamatanSabbang KabupatenLuwu Utara Tahun 2008	126
8	DokumentasiTanaman Kaka PetaniHasilRehabilitasi	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad modern seperti saat ini, hampir semua orang mengenal cokelat yang merupakan bahan makanan favorit, terutama bagi anak-anak dan remaja. Salah satu keunikan dan keunggulan makanan dari cokelat karena sifat cokelat dapat meleleh dan mencair. Bahan makanan dari cokelat juga mengandung gizi yang tinggi karena di dalamnya terdapat protein dan lemak serta unsur-unsur lainnya. Faktor pembatas utama konsumsi cokelat sehari-hari oleh masyarakat adalah harganya.

Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2002 perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sektor perkebunan setelah karet dan minyak sawit dengan nilai sebesar US \$ 701 juta. Perkebunan kakao di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dan pada tahun 2002 areal perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 914.051 ha. Kakao Indonesia mengalami perkembangan cukup

besar. Tahun 1969-1970, produksi kakao Indonesia hanya sekitar 1 ton atau peringkat ke 29 dunia (FAO,1972), kemudian meningkat sekitar 16 ton atau peringkat ke 16 dunia pada tahun 1980-1981. Mutu kakao rakyat ternyata masih cukup rendah, padahal bila dilihat dari segi jumlah adalah yang terbesar, sehingga masalah utama kakao pun menjadi faktor paling menonjol dan menjadi kendala utama dalam skala nasional (Puslitkoka, 2010).

Pada umumnya tanaman kakao mulai dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1980-an sehingga produktivitasnya sudah menurun dan sudah saatnya dilakukan perbaikan budidaya melalui peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Dengan melakukan berbagai upaya perbaikan tersebut maka perluasan areal perkebunan kakao diharapkan terus berlanjut. Pada periode 2005-2010, areal perkebunan kakao diperkirakan masih tumbuh dengan laju 2,5%/tahun sehingga total areal perkebunan kakao diharapkan mencapai 1.105.430 ha dengan total produksi 730.000 ton. Pada periode 2010-2025 diharapkan pertumbuhan areal perkebunan kakao Indonesia terus berlanjut dengan laju 1,5%/tahun, sehingga total arealnya mencapai 1.354.152 ha pada tahun 2025 dengan produksi 1,3 juta ton (Deptan, 2005).

Menurut status pengusaannya, perkebunan kakao di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Pada tahun 2009, perkebunan rakyat memiliki jumlah areal terbesar yaitu 92,7% dari total area perkebunan di Indonesia, kemudian diikuti oleh perkebunan besar negara 3,38% dan perkebunan besar swasta 3,41%. Dengan luas lahan kakao yang lebih besar merupakan kebun rakyat dapat

berdampak pada kualitas kakao yang dihasilkan relatif rendah, sehingga beberapa negara langsung menerapkan pemotongan harga terhadap produk kakao yang tidak memenuhi standar mutu (Puslitkoka, 2010).

Keberhasilan perluasan areal dan peningkatan produksi tersebut telah memberikan hasil nyata bagi peningkatan pangsa pasar kakao Indonesia di kancah perkakaoan dunia. Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai produsen kakao terbesar kedua dunia setelah Pantai Gading pada tahun 2002, walaupun kembali tergeser ke posisi ketiga oleh Ghana pada tahun 2003 (International Cocoa Organization, 2003). Tergesernya posisi Indonesia tersebut salah satunya disebabkan oleh makin mengganasnya serangan hama PBK. Pada saat ini teridentifikasi serangan hama PBK sudah mencapai 40% dari total areal kakao, khususnya di sentra utama produksi kakao dengan kerugian sekitar US\$ 150 juta per tahun.

Komoditi kakao konsisten sebagai sumber devisa negara yang pada tahun 2006 mencapai US\$ 855 juta, suatu kontribusi yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia, selain itu komoditi kakao sebagai sub sektor perkebunan merupakan sektor terdepan dalam penyerapan tenaga kerja. Dari sisi produksi, kecenderungan kakao Indonesia meningkat dari tahun 1983-1998. Namun demikian data statistik pertanian menunjukkan bahwa dari tahun 1998-1999 pertumbuhan produksi mengalami penurunan drastis sekitar (17,81%) meskipun demikian kembali meningkat pada tahun berikutnya. Di sisi lain, sektor kakao Indonesia hampir seluruh produk digunakan untuk memenuhi pasar ekspor (80,64%) (Arsyad, *et al*, 2011).

Beberapa kebijakan muncul sebelum program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2009 adalah program pengembangan agribisnis kakao yang dituangkan dalam program jangka panjang (2005-2025) adalah produktivitas tanaman pada tahun 2025 diproyeksikan menjadi 1,26 ton/ha/tahun, produksi kakao pada tahun 2025 diproyeksikan menjadi 1,3 juta ton/tahun, pada tahun 2025 sekitar 80 % dari total areal tanam diproyeksikan berupa tanaman unggul, pendapatan petani pada tahun 2025 diproyeksikan US\$ 2000/tahun (termasuk pendapatan dari diversifikasi usaha, harga produk ditingkat petani pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 85%, petani telah dikonsolidasikan kedalam kelembagaan yang efektif (*corporate community*), tersedianya input produksi secara lokal khususnya bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi lainnya, tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan biji kakao skala kecil di pedesaan dan industri hilir kakao berskala besar (BPTP Deptan, 2005).

Dalam jangka menengah (2005-2010) sasaran yang akan dicapai adalah produktivitas tanaman pada tahun 2010 diproyeksikan menjadi 1,1 juta ton/hektar/tahun dan produksi kakao pada tahun 2010 diproyeksikan menjadi 0,73 juta ton/tahun, pada tahun 2010 sekitar 30 % dari total areal tanam diproyeksikan berupa tanaman unggul, pendapatan petani pada tahun 2010 diproyeksikan US \$ 1500/ tahun, harga produk ditingkat petani pada tahun 2010 diproyeksikan sebesar 75 % (BPTP Deptan, 2005).

Secara ringkas arah program pengembangan agribisnis kakao adalah rehabilitasi kebun dengan menggunakan bibit unggul dengan teknik sambung samping, peremajaan kebun tua/rusak dengan bibit unggul, perluasan areal pada

lahan-lahan potensial dengan menggunakan bibit unggul. Peningkatan upaya pengendalian hama PBK,perbaikan mutu produksi sesuai dengan tuntutan pasar,pengembangan industri pengolahan hasil dari hulu sampai hilir sesuai dengan kebutuhan,pengembangan sub sistem penunjang agribisnis kakao yang meliputi bidang usaha pengadaan sarana produksi, kelembagaan petani dan lembaga keuangan.

Identifikasi di lapangan pada tahun 2008, menunjukkan bahwa sekitar 70.000 ha kebun kakao dengan kondisi tanaman tua, rusak, tidak produktif dan terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan berat sehingga perlu dilakukan peremajaan 235.000 ha kebun kakao dengan tanaman yang kurang produktif dan terkena serangan hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang perlu dilakukan rehabilitasi dan 145.000 ha kebun kakao dengan tanaman tidak terawat dan kurang pemeliharaan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi (serangan hama dan penyakit utama adalah penggerek buah kakao dan penyakit Vascular Streak Dieback (VSD), mengakibatkan menurunnya produktivitas menjadi 660 kg/ha/tahun atau sebesar 40% dari produktivitas yang pernah dicapai (1.100 kg/ha/tahun). Produksi kakao saat ini 435.000 ton dengan produksi dari perkebunan rakyat sekitar 87%, dan produksi tertinggi yakni 67% diperoleh dari wilayah sentra produksi kakao yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah (Suhendi, 2007).

Tabel 1.1 Produksi Kakao Menurut Provinsi di Seluruh Indonesia (Ton) Sebelum dan Setelah Gernas Kakao Tahun 2009.

No	Provinsi	Sebelum				Setelah		
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Nangro Aceh D	16.374	17.071	19.249	27.295	29.130	27.635	33.548
2.	Sumatera Utara	53.734	58,949	64.782	60,253	67.341	63,425	58.562
3.	Sumatera Barat	14.068	18,623	20.725	32.183	33.430	49.388	40.886
4.	Riau	3.728	3.558	4.079	4.076	4.574	3.321	3.234
5.	Kepulauan Riau	214	0	0	1	1	-	-
6.	Jambi	330	327	455	450	510	841	687
7.	Sumatera Selatan	262	590	590	379	1.185	1.708	2.105
8.	Bangka Belitung	36	48	71	81	94	66	84
9.	Bengkulu	5.200	4,582	4.627	5.442	5.105	5.098	5.050
10.	Lampung	17.737	25.611	24.671	25.251	26.037	26.539	22.542
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	3.861	3.464	2.739	3.704	3.612	2.062	2.428
13.	Banten	1.519	2.537	2.339	2.371	2.135	2.108	1.855
14.	Jawa Tengah	2.864	2.784	2.906	2.714	2.616	2.678	2.509
15.	Yogyakarta	486	862	957	1.184	1.192	1.198	998
16.	Jawa Timur	18.244	19.672	16.613	18.270	22.677	24.199	23.663
17.	Bali	7.10	5.680	7.457	6.767	6.826	6.177	5.061
18.	NTB	1.696	1,775	1.786	1.695	1.503	1.272	2.560
19.	NTT	14.970	14.910	11.762	11.928	12.054	12.978	10.500
20.	Kalimantan Barat	1.969	2.091	2.040	2.193	2.277	2.270	2.007
21.	Kalimantan Tengah	288	366	316	308	273	287	240
22.	Kalimantan Selatan	333	318	337	348	34	72 296	296
23.	Kalimantan Timur	25.072	26.774	24.331	23.894	12.037	8.063	11.59
24.	Sulawesi Utara	3.141	2.490	2.801	4.053	3.475	4.963	4.173
25.	Gorontalo	3.054	3.123	2.969	3.568	3.643	3.669	3.173
26.	Sulawesi Tengah	152.418	131.942	146.778	151.949	138.149	138.306	95.589
27.	Sulawesi Selatan	149.345	144.533	119.293	112.037	164.444	173.755	142.910
28.	Sulawesi Barat	96.481	112.927	88.436	149.458	96.860	96.011	82.692
29.	Sulawesi Tenggara	132.740	125.279	135.113	116.994	132.189	141.176	119.806
30.	Maluku	4.947	9,54	6.598	6.853	6.928	8.544	7.819
31.	Maluku Utara	11.879	17.058	10.233	12.534	13.128	12.884	10.288
32.	Papua	11.362	17,36	11.470	11.547	11.305	11.050	12.897
33.	Irian Jaya Barat	3.376	3.376	3.363	2.737	2.934	4.665	5.549
	Indonesia	748.828	769.386	740.006	803.593	809.583	837.918	712.231

Sumber : Statistik Perkebunan Tahun 2011

Permasalahan kakao tingkat sektor hulu (*on farm*) sebelum adanya program Gernas Kakao yaitu penurunan tingkat produktivitas dari 1.100 kg/ha/tahun pada tahun 2003 menjadi 660 kg/ha/tahun pada tahun 2008 di lokasi gerakan akibat tanaman tua, rusak, kurangnya perawatan tanaman dan serangan hama penyakit endemis kronis yang mengarah pada eksplosi, kurang

optimalnya sistem pengamatan dan pengendalian hama penyakit, terbatasnya ketersediaan sarana produksi untuk petani pekebun, rendahnya tingkat diseminasi teknologi akibat minimnya tenaga penyuluh serta luasnya cakupan wilayah dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, akses terhadap permodalan terbatas dan kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal (Mangga Barani, 2011).

Sementara tingkat hilir (*of farm*) yaitu mutu biji rendah sebagai akibat serangan PBK, VSD dan busukbuah serta penanganan pasca panen yang belum sesuai dengan GHP (Good Handling Practices), karena mutu rendah Kakao Indonesia terkena Automatic Detention untuk ekspor ke AS (belum memenuhi persyaratan mutu) sebagian besar biji kakao yang dihasilkan masih belum difermentasi, belum ada insentif harga terhadap biji kakao bermutu baik, masih terbatasnya kemitraan antara pengusaha/industri dengan petani pekebun dan masih rendahnya pemanfaatan kapasitas terpasang industri kakao.

Implikasi dari kondisi di atas memberikan isyarat kepada pemerintah sebagai penanggung jawab peningkatan produktivitas hasil pertanian khususnya sub sektor perkebunan pada komoditas kakao. Berbagai bentuk kebijakan yang dianjurkan pemerintah dalam menghadapi masalah perkakaoan Indonesia, salah satunya adalah kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) Tahun 2009. Kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) muncul untuk peningkatan produktivitas ini diimplementasikan lewat serangkaian program yaitu kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pelaksanaan Gernas Kakao di Indonesia Selama 2 tahun pertama (2009-2010) dan Rencana 2011 (Ha)

No	Kegiatan	Tahun 2009 (ha)		Tahun 2010 (ha)		Tahun 2011(ha)		Sisa (ha) (2009-2011)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Peremajaan	20.000	20.000	22.600	15.150	27.400	23.450	11.400
2.	Rehabilitasi	60.000	60.000	81.850	28.613	93.150	35.600	110.787
3.	Intensifikasi	65.000	65.000	30.550	15.900	49.450	49.450	14.650
	Jumlah (Ha)	145.000	145.000	135.000	59.663	170.000	108.500	136.837
	Anggaran (Rp)	985.484.962.000		498.127.525.000		1.000.000.000.000		

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2011

Dalam seminar hasil evaluasi pelaksanaan program Gernas Kakao kurun waktu 2 tahun yang diselenggarakan oleh Dirjen Perkebunan dan BAPPENAS tahun 2011, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah meningkatnya produktivitas kakao di lokasi gerakan dari rata-rata 690kg/ha/tahun menjadi 1.500 kg/ha /tahun, meningkatnya produksi kakao di lokasi gerakan dari 310.500 ton/tahun menjadi 675.000 ton/tahun (217%), meningkatnya pendapatan petani di lokasi gerakan dari Rp. 13.800.000/ha/ tahun menjadi Rp. 30.000.000/ha/tahun (217%), meningkatnya uang yang beredar di pedesaan lokasi gerakan dari Rp. 6,2triliun menjadi Rp. 13,5 triliun (217%), meningkatnya penerimaan devisa di lokasi gerakan dari US\$ 589,9 juta menjadi US\$ 1.485 juta (252%), meningkatnya mutu kakao sesuai SNI sebanyak 675.000 ton/tahun dan terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

Pelaksanaan Gernas Kakao mempunyai dampak terhadap berbagai aspek yaitu 1) aspek ekonomi diantaranya meningkatnya daya beli 450.000 petani, terbangunnya pusat-pusat perekonomian baru di pedesaan, memacu

perkembangan ekonomi regional dan citra Indonesia sebagai negara penghasil kakao terbesar kedua dunia menjadi lebih baik karena meningkatnya mutu, 2) aspek sosial dan 3) aspek lingkungan.

Di Indonesia, Sulawesi Selatan merupakan penghasil kakao terbesar dengan total produksi sekitar 35% dari total produksi nasional (Disbun Sulawesi Selatan, 2009). Meskipun umumnya skala kecil dan luas pertanian berkisar rata-rata 0,5-1,5 ha (Deptan, 2005). Dalam penataan perekonomian, Provinsi Sulawesi Selatan banyak bertumpu pada komoditas hasil pertanian, terutama komoditas kakao. Komoditas kakao telah dijadikan sebagai “komoditas citra unggulan” di wilayah ini, karena selain memberi kontribusi yang besar dalam struktur perekonomian daerah, juga telah berperan sebagai penyedia lapangan kerja sebagian besar penduduk. Luas areal tanaman kakao Sulawesi Selatan mencapai 257.313,20 ha dengan total produksi sebesar 110.009,45 ton biji kering per tahun (Disbun Sulawesi Selatan, 2009).

Dalam rapat koordinasi pertama tahun 2012 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur H. Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan keberhasilan peningkatan produksi yang dicapai dalam tahun 2011 diantaranya terjadi peningkatan produksi kakao dari 173,56 ribu ton tahun 2010 menjadi 198,41 ribu ton tahun 2011. Sementara itu dalam Seminar Nasional Evaluasi Gernas Kakao tahun 2009-2010 tanggal 5-7 Mei 2011 di Hotel Clarion Makassar, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ir. Gamal Nasir, MS menyampaikan hasil evaluasi yang direkomendasikan sebagai berikut; 1) program gernas kakao seyogyanya dilanjutkan karena memberi dampak positif

menyangkut produktivitas, produksi, pendapatan petani, pertumbuhan ekonomi dan juga pemberdayaan petani cukup signifikan, 2) program gernas dapat dijadikan sebagai momentum untuk kebangkitan industri kakao Indonesia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar di dunia.

Upaya rehabilitasi perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi kebun yang sudah ada melalui perbaikan bahan tanaman dengan teknologi sambung samping. Rehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun-kebun kakao petani yang telah dibangun dengan upaya perluasan areal, penyediaan bibit unggul dan dukungan teknologi budidaya maju, sehingga produktivitas kebun yang berhasil dibangun cukup tinggi (Ditjen Perkebunan, 2012). Rehabilitasi tanaman kakao yang dilaksanakan melalui kegiatan sambung samping, ini merupakan kegiatan yang sangat strategis terkait dengan pengembangan Kakao.

Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara dikategorikan sebagai wilayah yang potensial kehutanan dan perkebunan yang luas. Berdasarkan data komoditi perkebunan diperoleh bahwa komoditi perkebunan di Kabupaten Luwu Utara yang paling populer dan banyak ditanam petani adalah kakao (Dishutbun Kabupaten Luwu Utara, 2008). Luas lahan kakao di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 mencapai 56.939,94 ha dengan produksi 20.175,77 ton dan lahan kakao terluas terdapat di Kecamatan Sabbang dengan luas 11.343,90 ha dengan produksi 4.473,10 ton/ha/tahun.

Tabel 1.3 Produksi Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara (Ton) Sebelum dan Setelah Gernas Kakao Tahun 2009.

No	Kecamatan	Sebelum			Setelah	
		Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	Sabbang	4.473,10	4.716,33	7.894,71	8.728,35	9.441,14
2.	Baebunta	4.373,95	4.294,68	5.541,73	6.658,98	7.457,64
3.	Masamba	2.318,53	2.305,91	3.756,98	3.298,73	3.722,95
4.	Mappaeceng	672,10	1.001,32	1.330,79	2.424,66	1.932,95
5.	Malangke	2.708,13	3.349,25	3.789,10	3.022,50	4.054,74
6.	Malangke Barat	2.034,83	2.177,13	3.412,01	3.409,28	1.428,57
7.	Sukamaju	2.583,00	1.965,35	2.707,75	2.661,65	1.879,84
8.	Bone-Bone	649,36	1.322,97	2.247,02	2.578,69	3.204,20
9.	Seko	294,98	137,60	148,83	284,31	320,02
10.	Limbong	33,30	30,93	34,25	98,25	178,32
11.	Rampi	34,50	25,53	37,02	20,50	13,80
	Jumlah	20.175,78	21.327,00	35.153,76	33.185,89	32.691,51

Sumber: Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara 2012

Program rehabilitasi Gernas Kakao Tahun 2009 di Kabupaten Luwu Utara merupakan kegiatan yang sangat strategis terkait pengembangan kakao. Selain meningkatkan produksi, juga memperbaiki mutu biji kakao. Peningkatan produksi kakao petani telah dibangun dengan upaya perluasan areal, penyediaan bahan tanaman unggul dan dukungan teknologi budidaya yang maju, sehingga produktivitas kebun berhasil (Ditjen Perkebunan, 2012).

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Luas Areal Kegiatan Rehabilitasi Gernas Kakao Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009-2012.(Ha)

No	Kecamatan	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Rehabilitasi		Rehabilitasi		Rehabilitasi		Rehabilitasi	
		CPCL (Ha)	Realisasi (Ha)						
1	Sabbang	2.323,75	2.088,36	246,50	244,60	392,75	275,00	447,00	300,00
2	Baebunta	1.197,10	1.069,28	168,36	165,55	402,50	275,00	357,00	250,00
3	Malangke	1.315,69	1.182,38	185,00	185,00	283,75	200,00	287,50	200,00
4	Malbar	402,85	375,52	189,25	181,37	361,75	250,00	361,75	250,00
5	Masamba	179,50	168,96	100,00	98,69	114,00	100,00	-	-
6	Mappadeceng	647,82	634,99	112,00	108,28	148,00	100,00	-	-
7	Sukamaju	718,14	625,05	128,00	120,94	261,85	200,00	-	-
8	Bone-Bone	792,25	632,19	120,75	119,67	292,00	200,00	-	-
9	Limbong	-	-	93,25	75,83	-	-	-	-
	Jumlah	7.577,10	6.776,73	1.343,00	1.300,11	2.256,60	1.600,00	1.453,25	1.000,00

Sumber: Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara 2012

Tujuan dari Gernas Kakao adalah peningkatan produksi dan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan mutu hasil. Salah satu keberhasilan program gerakan nasional kakao ini dapat diukur dari peningkatan produksi dan pendapatan petani kakao. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengetahui peran kebijakan rehabilitasi dan menganalisis peningkatan produksi serta pendapatan petani penerima program rehabilitasi Program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan rehabilitasi Gernas Kakao kepada petani dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
2. Bagaimana produksi dan pendapatan petani sebelum dan setelah pelaksanaan program rehabilitasi Gernas Kakao di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mendiskripsikan kondisi pelaksanaan rehabilitasi Gernas Kakao.
2. Untuk menganalisis peningkatan produksi dan pendapatan petani sebelum dan setelah adanya program rehabilitasi Gernas Kakao di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yakni:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani dari kebijakan rehabilitasi Gernas Kakao.
2. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pertanian yang menyangkut pelayanan publik dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik.
3. Dapat mendorong peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang kebijakan Gernas Kakao.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan praktisi perkebunan terutama pihak pemerintah dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani kakao.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Falsafah Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan, kebijakan adalah kebijakan atau rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Penyusunan kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder (Dunn, 1998).

Kebijakan sebagai rekomendasi perlakuan untuk dilaksanakan dan mengambil kesimpulan- kesimpulan yang akan di evaluasi dan di analisis. Rekomendasi kebijakan akhirnya dapat dipelajari dan dipastikan bahwa apakah hasil dari kebijakan dapat disetujui, berkeadilan dan mencapai sasaran. Kebijakan sangat penting diperhatikan di masyarakat, apakah berjalan sesuai dengan harapan dan mendapat kemajuan bagi peningkatan kualitas dan kuantitas yang bersifat subyektif.

Menurut Dye (1992), kebijakan harus bertransaksi di masyarakat seperti kebijakan untuk kesejahteraan, kebijakan pendidikan, kebijakan lingkungan, kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan. Kebijakan pemerintah disusun dari yang prioritas sampai jangka panjang dan seterusnya. Kebijakan merupakan

suatu tindakan atau keputusan pemerintah untuk mendapatkan perubahan dari suatu program kerja yang telah berlangsung untuk lebih ditingkatkan.

Kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dan pemerintah memutuskan untuk memilih bertindak secara sengaja dalam penyelesaian masalah. Istilah kebijakan yang diterjemahkan memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (Suharto, 2008). Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Agenda Kebijakan

Pengagendaan dan proses sangat strategis dalam kebijakan publik yang memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda kebijakan sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issue*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Masalah kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn (1998), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih ditujukan kepada kebijakan masyarakat yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pemerintah melakukan banyak hal dalam masyarakat untuk mendistribusikan dan memperbaiki bentuk - bentuk kebijakan. Kebijakan harus bertransaksi dan bervariasi bentuk seperti kebijakan pajak, kebijakan penentuan harga dan kebijakan birokrasi (Dye,1992).

3. Formulasi Kebijakan

Secara ilmiah, kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat dipelajari yang bersifat teori. Pemahaman akibat dari keputusan kebijakan akan memperbaiki pengetahuan masyarakat dan dapat dipandang sebagai

kekuatan untuk menyelenggarakan berlangsungnya kebijakan yang dapat menambah luas dan arti yang dapat dipercaya (Dye, 1992).

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih ditujukan kepada kebijakan masyarakat yang akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pemerintah melakukan banyak hal dalam masyarakat untuk mendistribusikan dan memperbaiki bentuk - bentuk kebijakan. Kebijakan harus bertransaksi dan bervariasi bentuk seperti kebijakan pajak, kebijakan penentuan harga dan kebijakan birokrasi (Dye,1992).

Kebijakan suatu program kerja sangat menentukan jalannya atau terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai sasaran. Kebijakan sangat penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan tersebut memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

4. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi-informasi kebijakan agar dapat digunakan secara politis untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Tujuan analisis kebijakan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan penilaian yang beralasan dalam merumuskan solusi terhadap masalah-masalah yang praktikal.

Analisis kebijakan adalah hal penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau penyebab yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Penentu kebijakan telah mempelajari apa yang harus dilakukan untuk menyampaikan suatu kebijakan ke publik. Analisis kebijakan untuk menyerang isu-isu kebijakan penting dengan sistim penelitian secara sistematis merupakan asumsi yang tersirat dalam analisis kebijakan yang mengedepankan pengetahuan ilmiah (Dye,1992).

Untuk menganalisis suatu kebijakan di perlukan pendekatan-pendekatan analisis dalam mengkaji sejauh mana kebijakan mencapai sasaran yang diharapkan. Pendekatan analisis kebijakan yaitu pendekatan empirik dimana menjelaskan sebab akibat dari suatu kebijakan, pendekatan evalutatif melihat manfaat dari suatu kebijakan dan pendekatan normatif memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan mendatang.

Analisis kebijakan (*policy analysis*) dapat dibedakan dengan pembuatan atau pengembangan kebijakan (*policy development*). Analisis kebijakan tidak

mencakup pembuatan proposal perumusan kebijakan yang akan datang. Analisis kebijakan lebih menekankan pada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan proposal perumusan kebijakan yang baru. Namun demikian, baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan keduanya memfokuskan pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, sedangkan pengembangan kebijakan memberikan petunjuk bagi pembuatan atau perumusan kebijakan yang baru.

Memecahkan masalah kebijakan masyarakat dapat dipelajari secara profesional. Pemahaman akibat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan untuk mencari solusi dari masalah berdasarkan fakta-fakta adalah sebuah prasyarat kebijakan apakah dalam pelaksanaannya tidak banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan fakta.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai kebijakan dapat meliputi dua aspek-aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan kebijakan positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap keseluruhan efektivitas dari sebuah program nasional dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, atau penilaian terhadap efektivitas relatif dari dua atau lebih program dalam mencapai tujuan. Evaluasi kebijakan mempelajari konsekuensi dari kebijakan publik secara menyeluruh dari sebuah sistem dan prosedur yang mengarah pada beberapa segmen dalam sistem kebijakan tersebut (Dye,1992).

Penelitian evaluasi suatu kebijakan adalah sebuah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris dari efek-efek kebijakan yang sedang terjadi dari program-program kebijakan publik dalam target dari tujuan yang harus dicapai. Beberapa evaluasi kebijakan mengarah pada tujuan sebenarnya dari program kebijakan, karena biasanya suatu kebijakan menghasilkan tujuan yang bertentangan. Namun membatasi gagasan tentang evaluasi kebijakan akan lebih fokus pada semua konsekuensi dari kebijakan yaitu dampak kebijakan.

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, analis akan dihadapkan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat.
2. Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap

formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (*action*) diselenggarakan dalam mencapai tujuan.

3. Aspek evaluasi, pada aspek ini analisis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Samudro dkk (1994) evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi, evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Sedangkan evaluasi menurut Limberry (*dalam* Santoso, 1992), analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (*dalam* Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu:

1. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analisis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.

2. Single program before-after, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
3. Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analisis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarnya.
4. Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Mengevaluasi dampak dari suatu kebijakan adalah efek terhadap kondisi yang nyata yaitu dampaknya terhadap situasi yang ditimbulkan dari target atau efek samping, dampak dimasa yang akan datang, kondisi dalam waktu dekat, dampak biaya langsung, dampak sumber daya untuk mendukung program. Dampak kebijakan tidaklah sama dengan output kebijakan dalam melakukan penilaian kebijakan dengan hanya mengukur aktifitas pemerintah. Mengukur output suatu kebijakan adalah hal yang penting dalam merumuskan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas kebijakan itu.

B. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi Dan Mutu Kakao Tahun 2009

1. Latar Belakang Kelahiran Gernas Kakao Tahun 2009

Perkembangan kakao Indonesia tidak dapat dilepaskan dari program besar pada tahun 1980-an, yang dikenal dengan Proyek Rehabilitasi dan

Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE). Pada waktu itu Indonesia berkepentingan untuk mencari dan mengembangkan komoditas ekspor non migas, sekaligus untuk mengantisipasi penurunan produksi dan ekspor minyak dan gas bumi.

Kakao tumbuh pesat pada tahun 1990-an dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana. Petani kakao Indonesia sekarang diperkirakan 14 juta rumah tangga, umumnya berskala kecil sekitar 1 hektar lebih. Kenaikan harga kakao yang sangat tinggi pada saat terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an benar-benar telah membawa berkah tersendiri bagi petani kakao, terutama di Indonesia Timur. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa kakao di Indonesia telah berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan (CSP, 2008).

Walaupun demikian, permasalahan yang menimpa usahatani, sistem produksi dan industri kakao secara umum juga mulai bermunculan. Masalah yang dihadapi petani kakao Indonesia adalah: 1) serangan hama dan penyakit, 2) penurunan tingkat produktivitas, 3) rendahnya kualitas biji kakao yang dihasilkan karena praktek pengelolaan usahatani yang kurang baik, 4) tanaman sudah tua, dan 5) pengelolaan sumberdaya tanah yang kurang tepat.

Dalam rangka pengembangan kakao nasional telah ditetapkan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao. Kegiatan utama dari program tersebut adalah peremajaan tanaman kakao yang rusak, rehabilitasi tanaman yang kurang baik dan intensifikasi tanaman yang kurang produktif.

Gernas Kakao berdasarkan catatan Departemen Pertanian dilaksanakan di 9 propinsi dan 40 kabupaten di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kembali produksi kakao nasional yang selama ini dihadapkan pada persoalan hama dan penyakit. Peningkatan produksi dan mutu kakao ini ditempuh melalui program replanting, rehabilitasi dan intensifikasi kebun kakao milik rakyat.

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah upaya percepatan perbaikan budidaya tanaman kakao rakyat dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan dan melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumberdaya yang ada di 25 Provinsi meliputi 98 Kabupaten sentra kakao yang terkena serangan hama dan penyakit dengan kategori sedang sampai dengan berat (Ditjen Perkebunan, 2009).

Upaya pengembangan Kakao dihadapkan berbagai kendala antara lain: (1) produktivitas tanaman di bawah potensi normal (2) adanya berbagai serangan hama penyakit yang sulit dikendalikan oleh petani secara individual (3) mutu biji rendah (4) industri hilir dalam negeri belum berkembang sehingga masih dalam bentuk produk primer (5) sulitnya petani mendapatkan pendanaan khususnya untuk pengembangan kakao.

Selama ini telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut seperti pemberdayaan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), serta penerapan teknologi pengendalian dengan metode PSPSP (Pemupukan, Sanitasi, Panen Sering dan Pemangkasan) untuk

pengendalian PBK dan VSD serta penyediaan bibit unggul. Mengingat pelaksanaannya masih parsial dalam skala kecil, maka hasilnya belum optimal. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan secara serentak, terpadu dan menyeluruh melalui suatu gerakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan maupun sumber daya yang ada.

Walaupun demikian, beberapa masalah di lapangan dan koordinasi kebijakan tentu tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Langkah intervensi dan pemihakan dari pemerintah dan berbagai pihak masih sangat dibutuhkan, baik dari aspek budidaya dan perubahan teknologi, manajemen usaha tani, peremajaan tanaman, maupun penyuluhan dan penyebaran informasi usahatani dan pemasaran kakao. Tujuan utama dari intervensi ini adalah agar keberlanjutan industri kakao Indonesia dapat dipertahankan dan diselamatkan. Di sinilah rasionalitas kelahiran program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) Tahun 2009.

2. Pendekatan dan Pola Gerakan

Pendekatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah sebagai berikut:

1. Gerakan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, perbankan, petani, swasta dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
2. Lahan merupakan hamparan yang kompak atau berkelompok.
3. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Tanaman tua/rusak berat diremajakan dengan menggunakan klon unggul hasil perbanyakan teknologi Somatic Embryogenesis (SE).
5. Tanaman produktif dengan kondisi rusak sedang dilakukan rehabilitasi dengan cara sambung samping menggunakan klon unggul.
6. Tanaman dengan kondisi kurang terpelihara dilakukan intensifikasi.
7. Bahan tanam (bibit dan entres), pupuk dasar untuk peremajaan, pupuk awal untuk rehabilitasi dan intensifikasi, serta sarana pendukung sebagian disediakan oleh pemerintah.
8. Untuk petani yang mengikuti kegiatan peremajaan diberikan insentif benih tanaman sela (tanaman semusim) dan diupayakan untuk mendapat bantuan raskin.
9. Biaya tenaga kerja untuk pelaksanaan di kebun petani menjadi tanggungjawab petani/pekebun kecuali tenaga kerja pembongkaran dan penanaman untuk peremajaan sebagian ditanggung oleh pemerintah.
10. Biaya sarana produksi (pupuk, pestisida dan alat pertanian) untuk pemeliharaan tahun kedua dan ketiga memanfaatkan fasilitas kredit revitalisasi perkebunan melalui perbankan.
11. Peserta gerakan wajib mengelola kebun sesuai standar teknis dengan bimbingan dari pendamping/penyuluh/fasilitator dan instansi pembina.
12. Petani peserta berdomisili di lokasi gerakan dan merupakan pemilik kebun.

Pendekatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan dengan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

Menyediakan pembiayaan untuk pengembangan bahan tanam yaitu:

1. Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan pupuk dasar pada kegiatan peremajaan.
2. Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan pupuk awal pada kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi.
3. Menyediakan bantuan upah tenaga kerja petani untuk pembongkaran tanaman dan penanaman pada kegiatan peremajaan.
4. Menyediakan pembiayaan untuk pengadaan alat dan bahan pengendalian OPT.
5. Menyediakan pembiayaan tenaga pendamping dan saran pendukung.
6. Menyediakan sebagian pembiayaan untuk kegiatan pemberdayaan petani.
7. Menyediakan pembiayaan pembangunan sub-stasiun penelitian dan kebun percontohan.
8. Menyediakan sebagian pembiayaan untuk perbaikan mutu/sosialisasi penerapan standar mutu.
9. Menyediakan pembiayaan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengawalan kegiatan gerakan di 5 Kabupaten.

b. Pemerintah Provinsi

Menyediakan anggaran APBD dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yaitu :

1. Pengadaan dan penyediaan sarana produksi dan pelayanan informasi.
2. Penjamin/avalis pinjaman petani terhadap perbankan.
3. Penyediaan sebagian pembiayaan untuk pemberdayaan petani.
4. Penyediaan biaya sertifikasi lahan kebun kakao.
5. Menyediakan lahan untuk pembangunan sub stasiun penelitian.

c. Pemerintah Kabupaten

Menyediakan anggaran APBD untuk mendukung Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao yang meliputi kegiatan yaitu :

1. Penetapan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL).
2. Peningkatan mutu.
3. Pemberdayaan petani.

d. Perbankan

Menyediakan fasilitas kredit rehabilitasi perkebunan untuk pemeliharaan tahun kedua dan seterusnya (pupuk,pestisida, alat pertanian).

e. Swasta

Pelaksanaan sosialisasi penerapan standar mutu dan penyediaan sarana pasca panen.

f. Petani

Menyediakan pohon pelindung dan tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan di kebunnya kecuali untuk pembongkaran dan penanaman pada kegiatan intensifikasi.

C. Rehabilitasi

Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah menekankan perubahan yang terencana dalam pendekatan peningkatan produksi menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Perubahan pembangunan pertanian meliputi berbagai aspek seperti intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian (Masyhuri, 2007). Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki lahan atau komoditi pertanian yang tidak produktif menjadi lahan produktif dan berproduksi atau mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif.

Salah satu program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan kondisi tanaman kakao (pertumbuhan dan produktivitas) melalui teknologi sambung samping dengan menggunakan bahan tanaman unggul. Rehabilitasi tanaman kakao melalui sambung samping selain bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi juga bertujuan untuk memperbaiki mutu biji (Basri, 2010). Tujuan dari program rehabilitasi adalah memperbaiki kondisi tanaman kakao pada kebun-kebun yang kurang produktif dan terserang hama dan penyakit. Sasaran rehabilitasi adalah

kebun kakao yang tanamannya kurang produktif dan terserang OPT (hama, penyakit dan gulma).

Sambung samping adalah suatu teknik okulasi yang menggunakan kayu mata tunas dari klon terpilih dan ditempel pada tanaman dewasa yang telah berumur 15 tahun keatas yang sudah tidak produktif. Sambung samping pada tanaman kakao dilakukan dengan metode double dengan jarak antara sambungan pertama dan kedua 45-75 cm. Tujuan dari metode double untuk mengurangi resiko kegagalan dari penyambungan yang dilakukan. Prinsip dasar metode sambung samping adalah penyatuan kambium dari entres dengan kambium batang bawah, disamping itu penggunaan entres dari klon-klon unggul sangat dianjurkan karena berdampak pada peningkatan produksi dan mutu hasil serta keberhasilannya relatif tinggi.

Langkah kerja kegiatan sambung samping (Ditjen Perkebunan, 2009) adalah sebagai berikut :

a. Persiapan di kebun sebelum penyambungan.

1. Pohon kakao yang terpilih untuk sambung samping perlu dilakukan pemangkasan 40-50% sebelum disambung. Pohon-pohon pelindung yang mempunyai cabang-cabang yang rimbun dan menghalangi masuknya cahaya matahari ke pohon kakao juga perlu dipotong.
2. Kawasan pohon kakao perlu dipupuk terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk UREA atau NPK dengan dosis 250 – 500 gr per pohon. Pemupukan ini perlu dilakukan, terutama pada kawasan yang kurang subur atau yang

jarang dilakukan pemupukan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan batang pohon yang sehat sewaktu melakukan sambung samping.

b. Persediaan tapak sambungan.

1. Tapak sambungan dibuat pada ketinggian 45 – 75 cm dari dasar tanah batang utama.
2. Dua torehan mengarah ke bawah lebih kurang 7-10 cm dengan bentuk segitiga sama kaki. Torehan dibuat hingga ke kayu atau kambium batang pohon.



3. Bagian bawah kayu mata tunas hendaklah dipotong serong seperti tombak sepanjang 3,0-4,5 cm dan ujung lainnya lagi dipotong serong sepanjang 2-3 cm bersebelahan dengan potongan bagian bawah kayu mata tunas.



4. Kayu mata tunas yang telah disediakan hendaklah dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam tapak sambungan dengan membuka lidah torehan supaya bagian potongan tidak rusak.
5. Bagian potongan serong panjang kayu mata tunas menghadap/dilengketkan ke arah kayu tapak sambungan dan bagian potongan serong pendek membelakangi kulit pohon. Setelah kayu mata tunas dimasukkan ke dalam tapak sambungan hendaklah dibungkus dengan plastik sehingga menutup kayu mata tunas dan tapak sambungan serta diikat kuat dan dipastikan air hujan tidak akan masuk.



6. Potong pucuk pada sambungan yang berumur 3 bulan. Sambungan yang perlu ditinggalkan adalah 45 cm dari tempat penyambungan dan tinggalkan 3 - 5 mata tunas untuk membentuk dahan-dahan utama



7. Pemupukan pohon boleh dilakukan setelah daun pohon sambungan telah hijau (1-2 bulan setelah menyambung). Dan diikuti 3-4 bulan sekali atau 2 kali setahun.
8. Pohon utama hendaklah dipotong setelah umur 6-9 bulan setelah sambungan. Potongan dibuat sekurang-kurangnya 50 cm dari tapak sambungan. Potongan hendaklah dibuat serong atau 45° . Bagian potongan perlulah diolesi dengan obat luka pohon yang mengandung TAR (*Shell Tree Wound Dressing*).



Ruang lingkup kegiatan rehabilitasi (Ditjen Perkebunan, 2009) adalah:

a. Luas Lahan

1. Luas lahan kepemilikan maksimal 4 ha.
2. Lahan merupakan hamparan atau berkelompok.
3. Lahan harus dapat di sertifikasi.
4. Lahan terdaftar dalam kelompok tani sebagai kelompok sasaran.

b. Persyaratan Kebun

1. Kebun kakao yang akan direhabilitasi adalah kebun hamparan tanaman kakao.
2. Tanamannya masih umur produktif (umur <15 tahun) dan secara teknis dapat dilakukan sambung samping.
3. Jumlah tegakan/populasi tanaman antara 70% - 90% dari jumlah standar (1.000 pohon/ha).
4. Produktivitas tanaman rendah (<500 kg/ha/tahun) tetapi masih mungkin untuk ditingkatkan.
5. Jumlah pohon pelindung >70% dari standar.
6. Terserang OPT utama (hama PBK, *Helopeltis* spp dan Busuk Buah).
7. Lahan memenuhi persyaratan kesesuaian, meliputi: Curah hujan 1500-2.500 mm (sangat sesuai) dan 1.250-1.500 atau 2.500-3.000 mm (sesuai); Lereng 0- 8% (sangat sesuai) dan 8-15% (sesuai).

c. Entres

1. Menggunakan entres yang berasal dari pohon kakao klon unggul yang bebas dari infeksi penyakit (VSD dan *Phytophthora palmivora*) yang ditetapkan oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Entres berasal dari cabang plagiotrop, yaitu cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda (*semihardwood*).

2. Panjang entres 20 - 25 cm dikemas dalam kotak karton dengan media serbuk gergaji yang telah dicampur dengan alkosorb (5 gram/liter air).
3. Sumber entres berasal dari kebun dan dimurnikan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Ditjen Perkebunan, Puslitkoka, BBP2TP/UPTD IP2MB.
4. Entres yang digunakan sudah bersertifikat dan berlabel.

d. Pestisida

1. Menggunakan insektisida, fungisida dan herbisida yang efektif, terdaftar, dan mendapat izin dari Menteri Pertanian dengan dosis sesuai anjuran.
2. Beberapa insektisida yang sudah diuji efektivitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama PBK adalah insektisida berbahan aktif alfa sipermetrin, sihalotrin, fipronil, dan sipermetrin+klorfirifos.
3. Beberapa insektisida yang sudah diuji efektivitasnya oleh Puslit Kopi dan Kakao Jember untuk mengendalikan hama *Helopeltis* spp. adalah insektisida berbahan aktif deltametrin, sipermetrin (beta), sihalotrin (gamma, delta), BPMC, MIPC, metomil, esfenvalerat, fenitrothion, metidation, permetrin dan fenpropratin.
4. Hama *Helopeltis* spp. dapat juga dikendalikan dengan menggunakan bio pestisida (agens hayati *Beauveria bassiana*). - Penyakit VSD dicegah dengan fungisida berbahan aktif azoxystrobin. - Penyakit

kanker batang dikendalikan dengan fungisida berbahan aktif tembaga dengan engolesan setelah terlebih dahulu mengerok bagian yang sakit.

e. Pupuk

1. Pupuk yang digunakan adalah pupuk majemuk non subsidi dalam bentuk tablet, briket atau kedua-duanya.
2. Jenis dan dosis pupuk yang dipergunakan merujuk kepada hasil rekomendasi Puslit Koka Jember.
3. Dosis dan komposisi pupuk untuk setiap Kabupaten/ Kota pelaksana Gernas Kakao didasarkan atas hasil analisa tanah dan daun pada masing-masing lokasi. Pupuk sudah teruji efektivitasnya pada tanaman kakao.
4. Pupuk dikemas dalam kemasan khusus yang menyebutkan peruntukan bagi masing-masing kabupaten.
5. Diaplikasikan 1 (satu) kali, yaitu pada awal musim hujan.

f. Peralatan

1. Penyediaan alat pertanian kecil (gergaji dan hand sprayer)
2. Gergaji digunakan untuk memotong batang dan cabang pohon kakao yang akan direhabilitasi.
3. Hand sprayer digunakan untuk aplikasi pestisida (insektisida, herbisida dan fungisida).

g. Pelaksanaan

1. Sosialisasi

Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama melakukan sosialisasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional kepada petani.

1. Penetapan Petani Peserta

Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota melakukan survey CP/CL. Seleksi calon petani peserta dilakukan berdasarkan persyaratan yaitu petani: berdomisili di lokasi Gerakan yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), bersedia melaksanakan rehabilitasi dan mengikuti ketentuan Gerakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (membuat pernyataan tertulis), berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah, bergabung dalam kelompok tani kakao yang merupakan kelompok sasaran, jumlah anggota kelompok sasaran adalah 20 sampai dengan 25 orang. Luas kepemilikan lahan maksimal 4 (empat) hektar, lahan harus dapat disertifikasi. Calon petani peserta hasil survey diajukan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai petani peserta berdasarkan keputusan.

2. Pemberdayaan Petani

Petani peserta yang sudah ditetapkan diikutsertakan dalam pelatihan singkat yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

3. Pengadaan Bahan dan Peralatan

Pengadaan bahan dan alat rehabilitasi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu kepada KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan KEPPRES No.95 Tahun 2007 :

1. Entres

- Entres diadakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.
- Entres yang diadakan sesuai dengan butir b.
- Pengadaan entres dilakukan bekerja sama dengan Perusahaan Penangkar Benih (sesuai dengan Perjanjian/ Kontrak).

2. Pupuk

- Pengadaan pupuk awal untuk rehabilitasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. Khusus untuk Provinsi Papua diadakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.
- Jenis pupuk yang diadakan pupuk majemuk non subsidi berbentuk tablet, briket atau kedua-duanya sebanyak 200 (dua ratus) kg/ha.

3. Peralatan

- Pengadaan peralatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/ Kota.
- Peralatan yang diadakan adalah gergaji mesin (chainsaw) 1 (satu) unit per 100 ha dan alat semprot gendong (hand sprayer) 1 (satu) unit per 5 (lima) hektar.

4. Pestisida

- Pengadaan pestisida dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi. Khusus untuk Provinsi Papua diadakan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.
- Pestisida yang diadakan adalah insektisida untuk mengendalikan hama *Helopeltis* spp., fungisida untuk mengendalikan penyakit VSD dan herbisida untuk mengendalikan gulma.
- Bahan aktif pestisida yang akan diadakan seperti pada butir 4.3.

5. Sambung Samping

- Sambung samping dilakukan pada dua sisi batang bawah dengan ketinggian sekitar 60-75 cm dari permukaan tanah di awal musim penghujan.
- Tunas yang baru tumbuh harus dilindungi dari serangan OPT dengan aplikasi pestisida yang didasarkan atas hasil

pengamatan. Sedangkan terhadap pohon induk dilakukan pemangkasan secara reguler, panen sering dan sanitasi kebun.

- Cabang batang bawah yang menaungi tunas hasil rehabilitasi dipangkas secara bertahap.
- Batang bawah dipotong setelah tunas hasil rehabilitasi mulai berbuah.

6. Penanaman Pohon Pelindung

- Penanaman pohon pelindung tetap yang dianjurkan adalah tanaman gamal dengan jarak tanam 6m x 6m atau tanaman bernilai ekonomis lainnya seperti pohon meranti (nyatoh/palupi) dan lain-lain.

7. Pemupukan

- Diaplikasikan 1 (satu) kali setahun pada awal musim hujan.
- Jenis dan dosis pupuk sesuai dengan hasil analisa tanah dan daun dari Puslit Koka Jember.

8. Aplikasi Pestisida

- Penggunaan pestisida dilakukan apabila hasil pengamatan lapang menunjukkan adanya peningkatan intensitas serangan hama dan penyakit, dibandingkan dengan hasil pengamatan sebelumnya.
- Pengamatan OPT dilakukan oleh kelompok tani atau regu pengendali hama dan penyakit.

- Pengendalian gulma dengan herbisida berbahan aktif glifosat dan paraquat.

9. Waktu

Kegiatan rehabilitasi tanaman dilaksanakan pada tahun 2009. Khusus pelaksanaan sambung samping dilaksanakan pada awal musim kemarau.

10. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan di 34 Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di 6 Provinsi pelaksana Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.

11. Spesifikasi Teknis Peralatan

Chainsaw - Type: Portable - Isi silinder: 30 – 60 cc - Bahan bakar: Bensin - Panjang gergaji: 30 – 40 cm - Berat: 4 s/d 7 kg
2. Hand Sprayer - Berat kosong: 4,5 – 5,5 kg - Kapasitas tanki: 15-20 liter. Tekanan maksimum: 6 kg/cm² - Tekanan operasi normal: 2kg/cm² - Ukuran: Tinggi 530 – 540 mm Lebar 345 – 355 mm.

12. Luas Lahan Kegiatan Rehabilitasi Kebun Kakao di Sulawesi Selatan yaitu Bantaeng 2.000 ha, Bone 2.000 ha, Soppeng 1.500 ha, Wajo 1.500 ha, Sidenreng Rappang 1.500 ha, Pinrang 2.000 ha, Enrekang 1.000 ha, Luwu 2.000 ha, Luwu Utara 6.900 ha dan Luwu Timur 2.000 ha.

h. Tenaga Pendamping

- a. Tenaga pendamping diperlukan untuk mengawal pelaksanaan gerakan agar benar-benar sesuai dengan sasaran diharapkan. Tenaga pendamping tersebut adalah sarjana pertanian yang berasal dari Perguruan Tinggi setempat dan digunakan dengan sistem kontrak sedangkan rekrutmennya dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan dari masing-masing Provinsi, kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
- b. Pembantu Lapangan Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) adalah Tenaga Kontrak Perkebunan lulusan SLTA/Sekolah Kejuruan Pertanian yang direkrut oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembantu TKP untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao nasional serta tidak menuntut menjadi pegawai negeri Departemen Pertanian.
Petugas pendamping mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan khususnya masalah perkakaoan.
 - b. Melakukan pembinaan teknis budidaya kepada para petani peserta gerakan.
 - c. Melakukan penumbuhan dan pembinaan kelembagaan petani.
 - d. Menjembatani fungsi instansi/lembaga yang terkait dengan pembiayaan melalui program revitalisasi dengan perbankan.

- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan gerakan sesuai dengan jadwal ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

D. Petani

Petani adalah orang yang melakukan usahatani untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usahatani pertanian, peternakan dan perikanan. Petani adalah lebih daripada seorang juru tani dan manajer, ia adalah seorang manusia dan menjadi anggota dari kelompok manusia yang penting bagi baginya. Ia anggota sebuah keluarga dan ia pun anggota masyarakat setempat. Bagaimana petani itu sebagai manusia banyak ditentukan oleh keanggotaannya dalam masyarakat itu (Mosher, 1987).

Menurut Supandi (2008), dalam pelaksanaan kegiatan usaha, tindakan petani berpartisipasi tidak terlepas dari kemampuan diri serta perhitungan untung atau rugi. Dalam keadaan sewajarnya, petani tidak akan melakukan hal-hal di luar kemampuannya atau yang merugikan dirinya. Kemampuan petani berkaitan dengan situasi lingkungan serta keadaan yang melekat pada dirinya. Hal lain adalah petani di Indonesia merupakan petani kecil enggan penguasaan lahan yang relatif sempit. Petani merupakan subjek utama yang menentukan produktivitas usaha tani yang dikelolanya. Secara naluri petani menginginkan usaha taninya memberikan manfaat tertinggi dari sumber daya yang dikelola. Peranan petani sebagai pengelola usahatani berfungsi mengambil keputusan dalam mengorganisasikan faktor-faktor produksi sesuai pilihannya dari beberapa

kebijakan produksi yang diketahui. Produktivitas sumber daya usaha tani tergantung pada teknologi yang diterapkan. Oleh karena itu, kemampuan dan kemauan petani dalam mengadopsi teknologi budidaya anjuran merupakan syarat mutlak tercapainya upaya pengembangan pertanian di suatu daerah. Tujuan utama petani dalam melakukan kegiatan usahatani yaitu untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan hasil tanaman tersebut untuk mendapatkan pendapatan demi kesejahteraan.

Pemberdayaan petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara bertahap dan berkelanjutan dengan pelatihan dan pendampingan. Untuk Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, para petani akan dilatih dan ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan usahatannya melalui pelatihan teknis budidaya, pascapanen, peningkatan mutu, kelembagaan, pengelolaan keuangan dan kemitraan usaha.

E. Produksi

Pengertian produksi dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan fisik antara masukan (input) dengan keluaran (output) untuk suatu macam produk, fungsi produk menunjukkan output atau jumlah hasil produksi maksimum yang dapat dihasilkan per satuan waktu dengan menggunakan berbagai kombinasi sumber-sumber daya yang dipakai dalam berproduksi.

Usahatani merupakan proses produksi tanaman dan hewan yang dikelola oleh petani tersebut dapat berlangsung apabila terdapat lahan yang luas, sehingga lahan tersebut dinamakan usahatani (Masyhuri, 2007). Petani dalam mengelola atau mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan tersebut menggunakan prinsip perusahaan. Artinya dia mempertimbangkan berbagai kombinasi input yang diberikan agar bisa menghasilkan output sesuai dengan tujuan secara efisien dan efektif.

Produksi pertanian menurut Mosher (*dalam* Masyhuri, 2007) didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan yang dilakukan oleh petani dalam suatu usahatani. Dengan demikian unsur pertanian terdiri dari proses produksi, petani, usahatani dan usahatani sebagai perusahaan. Pertanian diartikan sebagai setiap campur tangan tenaga manusia dalam perkembangan tanaman maupun hewan agar diperoleh manfaat yang lebih baik daripada tanpa campur tangan tenaga manusia. Secara alami, tanaman dan hewan telah berkembang biak dengan sendirinya di hutan. Manusia tinggal mengambil sesuatu yang dihasilkan tanaman, misalnya buah-buahan, daun-daunan (sayuran), batang, dan umbi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bahan makanan utama. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.

Jenis usahatani (sawah, kebun, hutan, peternakan, dan sebagainya) serta potensi produksi pertanian ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat

kita kelompokkan ke dalam iklim, sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Faktor iklim belum dapat dikuasai oleh manusia, kecuali dalam bentuk pembuatan fasilitas irigasi untuk pengairan sawah. Proses produksi pertanian berbeda sifat dengan proses industri, yaitu dipengaruhi oleh faktor iklim dan faktor-faktor biotik lainnya seperti musim dan serangan hama penyakit yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pelaksanaan pekerjaan tertentu, misalnya membajak dan menanam, hanya dapat dilakukan jika keadaan iklim dan tanah memungkinkan, dan pertanian modern adalah pertanian yang berubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Penggunaan dan teknologi yang berkembang dalam pertanian modern memungkinkan tercapainya volume produksi dan jenis produksi yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan (Sutrisno, 2003).

Kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi sebagai syarat mutlak adanya pembangunan pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam teknologi maka pembangunan pertanian pun terhenti. Produksi bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau meningkatnya oleh serangan hama penyakit yang semakin merajalela. Pemerintah menciptakan kebijakan-kebijakan khusus yang dapat merangsang pembangunan pertanian. Kebijakan pada umumnya dapat meningkatkan rangsangan pada petani untuk bekerja lebih giat dalam mengusahakan usahatani untuk meningkatkan produksi. Tujuan produksi pertanian adalah memaksimalkan profit. Dalam upaya memaksimalkan profit, petani juga menghadapi sejumlah pilihan yang kompleks. Petani harus

memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumberdaya lahan, tenaga kerja, beberapa macam input variabel dan peralatan yang dimilikinya untuk mengusahakan suatu komoditi (Pakpahan, 2005).

Peningkatan produksi dapat diperoleh dengan mengalokasikan input produksi secara tepat dan berimbang. Hal ini berarti petani secara rasional melakukan usahatani dengan tujuan meningkatkan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan analisis komponen produksi tanaman kakao yang mempengaruhi perkembangan usahatani kakao khususnya terhadap produksi dan pendapatan petani. Komponen produksi setiap tanaman sangat beragam sesuai dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, terlebih pada klon-klon unggul yang memberikan hasil yang maksimal.

1. Komponen Produksi Tanaman Kakao

a. Batang

Batang pada tanaman kakao merupakan tempat keluarnya bunga dan buah setelah tanaman berumur 3 tahun keatas dan jika berumur 12 tahun batang mencapai 1,8-3 meter. Pada tanaman kakao dewasa asal biji, batang utama ditumbuhi tunas air atau wiwilan. Pertumbuhan tanaman kakao asal biji, batang dan cabang akan tumbuh tinggi tetapi bunga dan buahnya sedikit. Puncak produksi kakao dapat dicapai pada umur 10 – 20 tahun, dan keuntungan nominal rata-rata per tahun dapat diperoleh jika tanaman kakao diusahakan sampai umur 37 tahun (Puslitkoka, 2010).

b. Cabang

Percabangan pada tanaman kakao asal biji bersifat dimorfisme artinya memiliki 2 macam percabangan atau tunas vegetatif yaitu tunas ortotrop yang tumbuh keatas dan tunas plagiotrop yang tumbuh ke samping. Cabang ditumbuhi tunas air, dan jika tidak di pangkas dapat bersaing dengan batang utama sehingga akan mengurangi pembungaan dan pembuahan (Susanto, 1993).

c. Buah

Buah pada tanaman kakao asal biji sangat beragam dan warnanya ada 2 macam yaitu ketika buahnya muda warna hijau, jika masak warna kuning (tipe criollo) dan buah muda warna merah, jika masak berwarna oranye (tipe forastero). Buah kakao masak setelah berumur enam bulan. Pada saat masak ukuran buah beragam dari 10 hingga 30 cm, tergantung pada jenis kakao dan faktor-faktor lingkungan selama perkembangan buah. Jika tanaman kakao dirawat, dipelihara dan sehat akan menghasilkan buah antara 20 – 30 per pohon (Puslitkoka, 2010).

d. Biji

Buah kakao berisi biji yang tersusun dalam lima baris mengelilingi poros buah. Jumlah biji sangat beragam sesuai dengan jenis atau klon kakao yaitu 20-50 biji per buah.

2. Sistim Budidaya Kakao

a. Kesesuaian Lahan Kakao

Tanaman kakao merupakan tanaman tahunan yang memerlukan lingkungan khusus untuk dapat berproduksi secara baik. Lingkungan alami kakao adalah hutan hujan tropis, dan berproduksi tinggi dan menguntungkan jika diusahakan di lingkungan yang sesuai. Faktor lahan mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung tingkat produktivitas kakao. Kesesuaian lahan mempunyai manfaat untuk mengetahui potensi sumber daya lahan dalam mendukung suatu usaha tani tertentu dan memprediksi produksi yang dapat diperoleh. Persyaratan kesesuaian faktor iklim meliputi curah hujan 1250-3000 mm tiap tahun, suhu 21-30 derajat celcius, kelembaban 70-80%, sinar matahari 25-35% (tanaman muda) 65-75% (tanaman dewasa), pH tanah yang ideal 6,0-7,5, tanah berkadar organik tinggi diatas 3% dan topografi lahan datar dengan kemiringan 8-15% (Baon, 2010).

b. Perbanyak Tanaman Kakao

Tanaman kakao diperbanyak secara generatif dan vegetatif. Perbanyak secara generatif akan menghasilkan tanaman kakao dengan batang utama mengarah keatas yang tegak. Untuk budidaya tanaman kakao secara generatif menggunakan biji atau benih yang diambil dari tanaman kakao yang berproduksi serta mutu hasilnya baik. Jenis kakao yang dianjurkan untuk perbanyak secara generatif yaitu benih kakao hibrida adalah jenis kakao lindak. Perbanyak tanaman

kakao secara vegetatif yang banyak digunakan sebagai bahan tanaman adalah batang dan cabang yang disebut dengan entres untuk okulasi, sambung samping (*side grafting*) dan sambung pucuk (*top grafting*) (Winarno, 2010).

Perbanyakan secara vegetatif akan menghasilkan tanaman yang secara genetis sama dengan pohon induknya sehingga diperoleh tanaman kakao yang produktivitas serta kualitasnya seragam. Selain perbanyakan secara generatif dan vegetatif, tanaman kakao juga dapat di perbanyak melalui teknik somatic embryogenesis (SE). Disesuaikan dengan kondisi awal lahan

c. Persiapan Lahan Penanaman

1. Disesuaikan dengan kondisi lahan.
2. Dibuat ajir dan lubang tanam dengan jarak 3 x 3 m atau 4 x 4 m
3. Lubang tanam ukuran 50 x 50 x 50 cm.
4. Lubang tanam di isi pupuk kandang 3 kg dan dicampur dgn lapisan tanah atas (top soil).
5. Setelah 1- 2 bulan lubang tanam siap, penanam dilakukan pada bibit kakao yg berumur 4-6 bulan.
6. Penanaman pelindung sementara seperti penanaman tanaman pisang ditanam sebelum penanaman bibit untuk mencegah kematian dan pertumbuhan lambat, dan bisa menggunakan pelindung sementara dari daun kelapa dan daun sagu.

7. Penanaman pohon pelindung tetap seperti pohon lamtoro, sengon dan gamal ditanam 9 bulan sebelum penanaman.

4. Pemangkasan

Tujuan pemangkasan pada tanaman kakao yaitu untuk membentuk tanaman dan tajuk kakao sehingga memacu perkembangan cabang sekunder untuk menghasilkan banyak buah. Komponen pemangkasan pada tanaman kakao adalah :

1. Pemangkasan bentuk ; pemangkasan pucuk dan pemangkasan bentuk tajuk.
2. Pemangkasan tunas air/wiwilan
3. Pemangkasan pemeliharaan
4. Pemangkasan produksi

5. Pemupukan

Umur Tanaman (Thn)	Jenis Pupuk			
	Urea (gr)	SP-36 (gr)	KCL (gr)	Organik (gr)
1	0	0	0	3,6
2	22	20	25	3,6
3	44	41	50	4,5
4	89	83	100	5,5
5	178	105	200	7,3
6	222	207	331,8	7,3

Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman

dan diberikan berdasarkan umur tanaman. Pemupukan dilakukan dengan membuat lubang piringan setengah lingkaran pada jarak 75-100 cm dari batang pokok sedalam 10 cm. Pemupukan dilakukan dua kali dalam setahun, dan diberikan pada awal musim hujan dan pada akhir musim hujan pada bulan Maret, April, Oktober atau November.

c. Sanitasi dan Penyiangan

Tujuan sanitasi dan penyiangan adalah untuk mencegah persaingan dalam penyerapan air dan unsur hara dan mencegah hama dan penyakit. Sanitasi dan penyiangan harus dilakukan secara rutin, minimal satu bulan sekali yaitu dengan menggunakan cangkul, koret, atau dicabut dengan tangan.

d. Pemberantasan Hama Penyakit

Hama tanaman kakao; PBK, helopeltis, penggerek batang, ulat kilan, tikus, penyakit tanaman kakao; busuk buah, kanker batang, VSD serta pencegahannya adalah sisten PsPSP (Pemangkasan Sering, Pemupukan, Sanitasi, Panen).

3. Keberlanjutan Sistem Budidaya Kakao

Paradigma modernisasi pembangunan pertanian yang telah mencapai tujuan dalam peningkatan produksi berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mengelola usahatani agar menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Keberlanjutan diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan agar tidak merosot supaya upaya terus berlangsung (Fahmid, 2012).

Keberlanjutan sistem budidaya tanaman kakao sangat penting untuk terus dikembangkan dengan kajian pemikiran teori dan praktik dalam usahatani kakao, disamping sebagai penyedia lapangan kerja juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan. Berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan budidaya tanaman kakao merupakan hal yang sangat strategis demi kelangsungan usahatani kakao menuju industri kakao yang berkelanjutan dengan dukungan pembinaan, pembangunan infrastruktur komersial dan kerangka kebijakan yang bervisi pembangunan usaha dan sistem agribisnis yang sekaligus memberdayakan petani serta menjadikan sektor kakao Indonesia yang lebih tangguh melalui serangkaian program baik dari pemerintah, swasta dan inisiatif masyarakat.

Program rehabilitasi Gernas Kakao terus dilanjutkan karena masih banyak lahan kakao yang membutuhkan rehabilitasi, tetapi pendekatannya harus diubah dengan lebih berorientasi kepada petani (Bakri, 2011).

F. Harga

Harga merupakan nilai dari suatu barang yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Untuk mendapatkan harga yang layak, petani terangsang untuk selalu meningkatkan produksi untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang tinggi (Masyhuri, 2007). Kecenderungan petani menjual hasil usahatannya jika selesai panen karena secepatnya mendapatkan uang untuk keperluan dan kebutuhan rumah tangga. Walaupun harga tinggi tetapi produksi rendah juga akan mempengaruhi pendapatan, dan bahkan pendapatan yang didapat dari hasil penjualan kurang, sehingga biaya yang

dikeluarkan setiap periode pemeliharaan tanaman usahatani tidak sebanding dari hasil pendapatan.

Harga kakao dunia mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan harga kakao domestik karena pedagang kakao di sentra-sentra utama produksi kakao Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara menggunakan harga bursa New York sebagai acuan dalam menetapkan harga di tingkat petani (Baon, *et al*, 2005). Dibutuhkan pengembangan perluasan areal bagi petani, sistim budidaya yang baik, penggunaan bibit dan klon yang unggul, peningkatan upaya pengendalian hama dan penyakit, perbaikan mutu produksi, pengembangan sub sistem penunjang agribisnis kakao, kelembagaan petani dan lembaga keuangan dan modal serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendapatkan peningkatan produksi dan pendapatan yang maksimal.

G. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Budiono (1992: 180) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi (1992: 171) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pendapatan jasa adalah nilai dari seluruh jasa yang dihasilkan suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam akuntansi pendapatan dan beban dijelaskan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak secara langsung berasal dari kontribusi penanaman modal.

Analisa pendapatan mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Ada dua tujuan utama dari analisa pendapatan yaitu menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha, dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan (Anonim, 2010).

Pendapatan yang diterima seorang petani dalam satu tahun berbeda dengan pendapatan yang diterima oleh petani lainnya. Bahkan seorang petani yang mengusahakan luas tanah yang sama dari tahun ke tahun. Berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan petani berbeda diantaranya masih dapat dirubah dalam batas-batas kemampuan petani, tetapi ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah yaitu iklim dan jenis tanah. (Anonim, 2010). Bagi seorang petani analisa pendapatan memberikan acuan untuk mengukur apakah kegiatan usahataniya pada saat itu berhasil atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh petani merupakan nilai dari hasil produksi yang akan dihasilkan di lapangan, yang pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan. Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani dan pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran.

2. Konsep Pendapatan

Tujuan akhir dari pengelolaan suatu usahatani adalah mendapatkan pendapatan. Menurut Soeharjo dan Patong (1973), pendapatan dalam usaha tani merupakan selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan produksi. Karena dalam kegiatan sehari-hari seorang petani bertindak sebagai pengelola, sebagai pekerja, dan sebagai penanam modalnya pada usahanya, maka pendapatan ini dapat digambarkan sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi yang biasanya dihitung dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini ukuran pendapatan ada empat kategori yaitu:

1. Pendapatan kerja petani, adalah merupakan selisih antara semua penerimaan yang berasal dari penjualan, yang dikonsumsi keluarga, dan kenaikan nilai inventarisasi dengan semua pengeluaran, baik pengeluaran tunai maupun pengeluaran yang tidak diperhitungkan.
2. Penghasilan kerja petani, adalah merupakan jumlah dari pendapatan kerja dengan penerimaan yang tidak tunai, seperti hasil-hasil usahatani yang tidak dikonsumsi keluarga.

3. Pendapatan kerja keluarga, adalah merupakan jumlah penghasilan kerja petani dengan nilai kerja keluarga. Disini kerja yang berasal dari keluarga diperhitungkan sebagai pendapatan, karena merupakan balas jasa terhadap usahatani yang dikelolanya.
4. Pendapatan keluarga, adalah merupakan jumlah pendapatan dari sumber - sumber lain yang diterima petani bersama keluarganya, di samping kegiatan utamanya. Cara ini dipakai apabila petani tersebut tidak membedakan sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Adiwilaga (1975) menyatakan, antara nilai nyata pendapatan dapat dilihat dan diperhitungkan dari dua segi yaitu:

- pendapatan tunai, adalah merupakan selisih penerimaan tunai dengan biaya tunai. Penerimaan tunai merupakan penerimaan yang betul-betul diterima petani atas penjualan dari sejumlah hasil produksinya. Sedangkan biaya tunai, merupakan jumlah biaya yang betul-betul dikeluarkan petani dalam mengelola usahatannya.
- Pendapatan total, adalah merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya, baik biaya tunai ataupun yang diperhitungkan. Dari kedua segi penilaian pendapatan ini, dapat dilihat secara nyata jumlah pendapatan betul-betul yang diperoleh petani dan sejumlah pendapatannya yang seharusnya diterima petani.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah semua barang, jasa dan uang yang diperoleh atau

diterima oleh seseorang atau masyarakat dalam suatu periode tertentu dan biasanya diukur dalam satu tahun yang diwujudkan dalam skop nasional (*national income*) dan ada kalanya dalam skop individual yang disebut pendapatan perkapita (*personal income*).

Tingkat pendapatan petani secara umum dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu: jumlah produksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan petani dalam pertaniannya. Ini berarti bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian merupakan usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan sebagian besar penduduk yang tergolong miskin. Untuk memperbesar pendapatan nyata dapat diusahakan melalui:

- a. Memperbesar jumlah produksi yang dipakai masyarakat
- b. Menaikan efisiensi untuk setiap faktor produksi
- c. Merubah lingkungan sosial dan struktural sehingga sumber-sumber produktif dapat ditambah ataupun hasilnya dapat diperluas dengan memuaskan.

Sebagian besar produksi kakao ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor sehingga perolehan pendapatan dari kakao cukup berarti baik bagi petani maupun bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi perkebunan kakao terhadap pendapatan petani merupakan masalah penting bagi pengembangan skala usahatani. Pendapatan yang diperoleh dari suatu usahatani berkaitan erat dengan produksi dan alokasi faktor produksi. Jika dibandingkan dengan produksi kakao di tingkat hasil penelitian yang mencapai 2-3 ton/ha, maka produksi kakao tergolong masih rendah. Rendahnya produksi ini

dapat disebabkan oleh tingkat kesuburan lahan dan belum optimalnya teknologi budidaya.

Mustaha (2002) menyatakan bahwa sebagian besar lahan pertanaman kakao memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat beragam dari sangat rendah sampai sedang, sedangkan Kartono (2003) menyatakan bahwa sebagian besar lahan pertanaman kakao di memiliki status bahan organik yang sangat rendah. Selain itu penanaman tanaman kakao yang dilakukan oleh masyarakat seringkali mengabaikan pertimbangan konservasi lahan akibatnya proses kehilangan kesuburan tanah semakin meningkat setiap tahunnya. Melihat permasalahan dan kendala tersebut maka produksi yang diperoleh belum optimal.

3. Analisis Pendapatan

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencaharian usaha. Budiono (1992: 180) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi (1992: 171) pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi.

Analisa pendapatan mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Ada dua tujuan utama dari analisa pendapatan yaitu menggambarkan keadaan sekarang suatu kegiatan usaha, dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan atau tindakan (Anonim, 2010).

Pendapatan yang diterima seorang petani dalam satu tahun berbeda dengan pendapatan yang diterima oleh petani lainnya. Bahkan seorang petani yang mengusahakan luas tanah yang sama dari tahun ke tahun. Berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan petani berbeda diantaranya masih dapat dirubah dalam batas-batas kemampuan petani, tetapi ada faktor-faktor yang tidak bisa diubah yaitu iklim dan jenis tanah (Anonim, 2010). Bagi seorang petani analisa pendapatan memberikan acuan untuk mengukur apakah kegiatan usahataniya pada saat itu berhasil atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh petani merupakan nilai dari hasil produksi yang akan dihasilkan di lapangan, yang pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi dengan harga jual, biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani dan keuntungan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Tujuan akhir dari pengelolaan suatu usahatani adalah mendapatkan pendapatan. Menurut Soeharjo dan Patong (1973), keuntungan dalam usahatani merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan produksi. Karena dalam kegiatan sehari-hari seorang petani bertindak sebagai pengelola, sebagai pekerja, dan sebagai penanam modalnya pada usahanya, maka pendapatan ini dapat digambarkan sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi yang biasanya dihitung dalam jangka waktu tertentu.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Pembangunan pertanian diartikan untuk meningkatkan produksi pertanian dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan petani yang merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia. Pembangunan sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan taraf hidup petani disamping mendukung pertumbuhan sektor industri.

Kakao merupakan komoditi perkebunan yang potensial mengisi peluang pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Dengan melonjaknya harga komoditi pertanian yang berorientasi ekspor maka petani terdorong untuk meningkatkan produksi dengan tujuan mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang lebih tinggi. Upaya peningkatan produksi tidak akan menguntungkan bila penggunaan input produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dan modal yang dikeluarkan oleh petani. Petani yang rasional tidak hanya berorientasi pada produksi yang tinggi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada semakin tingginya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, kegiatan dilakukan melalui proses sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber input yang ada diubah untuk memperoleh suatu produksi.

Pembangunan pertanian yang oleh pemerintah dalam upaya menjamin pembangunan partisipasif, optimasi pemanfaatan sumberdaya yang beragam dan mencapai pembangunan pertanian yang lebih merata. Perubahan orientasi pembangunan dari pendekatan peningkatan produksi menjadi peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani. Perubahan dari penekanan pada upaya menghasilkan produk tanaman primer mengarah pada produk-produk olahan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan, melalui pengembangan agribisnis di pedesaan (Masyhuri, 2007).

Petani sebagai produsen yang rasional akan memaksimalkan pendapatan dalam menjalankan usahatani secara efisien. Pendapatan maksimum diperoleh apabila produksi per satuan luas perusahaan dapat optimal, artinya mencapai produksi yang maksimal dengan menggunakan input produksi secara tepat dan berimbang. Oleh karena itu pengaruh pemakaian input - proses - output terhadap pendapatan petani perlu diketahui sehingga petani dapat mengambil sikap untuk mengurangi atau menambah input produksi tersebut.